



**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR
KEPEMILIKAN TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN
RISIKO KEUANGAN**

Budi Setyawan
Universitas Pamulang Tangerang Selatan

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Dikirim : 18 Januari 2019
Revisi pertama : 18 Januari 2019
Diterima : 19 Januari 2019
Tersedia online : 31 Januari 2019

*Kata Kunci : Tata Kelola Perusahaan,
Struktur Kepemilikan, Pengungkapan
Risiko Keuangan*

Email : dosen01453@unpam.ac.id

Transparansi merupakan suatu kebutuhan yang mutlak dalam dunia bisnis, pelanggaran atas transparansi menjadi skandal yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat pada entitas bisnis. Pengungkapan risiko merupakan bukti nyata dalam penerapan mekanisme corporate governance yang mendorong terwujudnya good corporate governance. Selain corporate governance, faktor yang mendorong pengungkapan risiko keuangan adalah faktor kepemilikan perusahaan, pada perusahaan yang dimiliki oleh kepemilikan institusional, diharapkan pengungkapan risiko menjadi prioritas. Penelitian ini menggunakan sampel 6 emiten manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016 yang memenuhi kriteria peneliti. Pengolahan data menggunakan regresi berganda dengan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan, Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Risiko, Komite Audit berpengaruh tidak signifikan terhadap Pengungkapan Risiko dan Kepemilikan Institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap Pengungkapan Risiko. Secara bersama-sama, terdapat pengaruh signifikan variabel bebas Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional terhadap variabel terikat Pengungkapan Risiko.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Transparansi merupakan suatu kebutuhan yang mutlak dalam dunia bisnis, pelanggaran atas pengungkapan yang sebenarnya telah menjadi skandal skandal yang merugikan banyak pihak dan berdampak pada perekonomian dunia karena berkurangnya kepercayaan masyarakat pada entitas bisnis, seperti kasus Enron, Worldcom, dan skandal investasi Lehman dan Brothers, skandal tersebut terjadi karena kurangnya pengungkapan atau pengungkapan informasi yang salah oleh perusahaan.

Realisasi transparansi dapat diwujudkan dengan pengungkapan risiko pada laporan keuangan perusahaan, informasi risiko dapat membantu investor dalam proses pembuatan keputusan investasi yang rasional, membantu dalam menentukan profil risiko perusahaan, estimasi nilai pasar dan ketepatan perkiraan harga sekuritas. Bagi perusahaan, informasi mengenai risiko dapat membantu dalam mengelola perubahan, menurunkan biaya modal, dan pedoman mengenai alur bisnis di masa mendatang, sedangkan bagi kreditur, informasi mengenai risiko dapat membantu dalam pengambilan keputusan kredit yang diberikan kepada perusahaan. Agustami dan Yunanda (2014) menyatakan pengungkapan (*disclosure*) merupakan salah satu bentuk keterbukaan atau transparansi suatu perusahaan. Transparansi suatu informasi keuangan suatu perusahaan adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap para investor maupun kreditor, dan hal ini akan menjadi suatu bahan pertimbangan para investor maupun kreditor untuk memutuskan apakah akan menanamkan atau meminjamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Pengungkapan diharapkan mampu untuk membantu kreditur dalam memahami keadaan suatu perusahaan.

Survei Norton Rose yang dikutip Agustami dan Yunanda (2014) menyatakan bahwa 57% responden dari pelaku industri di hampir seluruh dunia menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara tujuan berinvestasi dengan risiko tinggi. Faktor lemahnya penegakan hukum, maraknya kasus korupsi hingga keterbatasan infrastruktur menjadi alasan mengapa Indonesia menjadi salah satu negara dengan *High Risk Level*. Survey Jetro pada tahun 2013 yang juga dikutip Agustami dan Yunanda (2014) juga mengungkapkan hasil dari survey yang menyatakan bahwa Indonesia termasuk dalam negara dengan tingkat risiko yang tinggi dibandingkan dengan negara lain. Risiko dari segi infrastruktur, biaya pekerja, hukum di Indonesia yang masih sangat lemah, maupun risiko politik yang menjadi alasan mengapa Indonesia termasuk *High Risk Level*. Persentase risiko dihitung tinggi jika melebihi 20%. Indonesia mencapai 36% berisiko tinggi di infrastrukturnya, 27,2% risiko di legal system dan hukum Indonesia yang masih sangat lemah. Belum juga masalah biaya pekerja yang mencapai 21% urutan ketiga setelah China dan Thailand. Dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia memiliki tingkat risiko yang jauh lebih tinggi. Hal hal seperti ini yang membuat Indonesia tergolong dalam *High Risk Jurisdiction*.

Pemerintah dan semua *stakeholders* yang berkaitan dengan praktik bisnis di Indonesia telah melakukan langkah-langkah agar risiko yang dihadapi oleh suatu emiten diungkapkan dengan cukup (*adequate*), wajar (*fair*), dan lengkap (*full*). Ketentuan mengenai pengungkapan risiko oleh perusahaan di Indonesia secara eksplisit dapat ditemukan di PSAK No. 60 (Revisi 2010) tentang Instrumen keuangan: Penyajian dan Pengungkapan. Dalam PSAK No. 60 (Revisi 2010) disebutkan bahwa

informasi mengenai sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan dapat berupa pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif. Pengungkapan kualitatif entitas harus mengungkapkan eksposur risiko, bagaimana risiko timbul, tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan risiko serta metode pengungkapan risiko sedangkan dalam pengungkapan kuantitatif, entitas disyaratkan untuk mengungkapkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar termasuk membuat analisa sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar.

Selain itu, keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-36/PM/2003 dan Kep-346/BL/2011 mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala bagi Emiten atau Perusahaan Publik, menyatakan bahwa emiten selain diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan juga diwajibkan untuk menyertakan penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko tersebut. Risiko-risiko itu misalnya, risiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan kebijakan pemerintah.

Tiga konsep dalam pengungkapan adalah pengungkapan yang cukup (*adequate*), wajar (*fair*), dan lengkap (*full*). Cukup artinya pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Pengungkapan secara wajar menunjukkan tujuan etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan umum bagi semua pemakai laporan keuangan. Pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relevan. Perusahaan dikatakan telah mengungkapkan risiko jika pembaca laporan keuangan diberi informasi mengenai kesempatan atau prospek, bahaya, kerugian, ancaman atau eksposur, yang akan berdampak bagi perusahaan sekarang maupun masa mendatang.

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) adalah sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan pemilik baik yang memiliki saham mayoritas maupun minoritas di suatu perusahaan. *Corporate governance* berguna untuk melindungi investor dari adanya perbedaan kepentingan pemegang saham (*principle*) dengan pihak manajemen (*agent*) (Annisa dan Lulus, 2012). Masalah dalam *corporate governance* terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Dewan komisaris yang berperan sebagai *agent* dalam suatu perusahaan diberi wewenang untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik, namun *agent* tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham (Fitri, 2015).

Pengungkapan risiko adalah salah satu bukti nyata dalam penerapan mekanisme *corporate governance* sehingga dengan adanya pengungkapan risiko dapat mendorong terwujudnya *good corporate governance*. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* bertujuan mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan kemudian mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan (Christie, 2014).

Lebih lanjut, Christie (2014) menyatakan Dewan Komisaris dibagi menjadi dua yaitu komisaris dan komisaris independen. komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain dewan komisaris independen, untuk menjaga kesinambungan terlaksananya mekanisme *corporate governance* maka diperlukan komite audit, Komite audit berfungsi untuk membantu tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit dipandang sebagai alat untuk menghindari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan memonitoring kinerja manajemen (Suhardjanto, 2012).

Selain *corporate governance*, faktor yang mendorong pengungkapan risiko keuangan adalah faktor kepemilikan perusahaan, pada perusahaan yang dimiliki oleh kepemilikan institusional, ada peningkatan yang cukup signifikan pada pengungkapan risiko (Mangena dan Pike, 2005; Elzhar dan Hussainey, 2012).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manipulasi informasi mengenai risiko yang diungkapkan. Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan risiko perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang diungkapkan melalui reaksi pasar atas pengungkapan risiko dalam laporan keuangan perusahaan (Mubarok, 2013).

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini terfokus pada pengaruh tata kelola perusahaan, yang diproksikan oleh jumlah dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit, serta struktur kepemilikan institusional terhadap tingkat pengungkapan risiko keuangan dengan melakukan studi empiris pada perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sebagainya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Pengungkapan Risiko Keuangan

Pengungkapan risiko adalah salah satu bentuk disclosure yang dilakukan perusahaan untuk memberikan informasi mengenai risiko-risiko yang dialami dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan dalam satu periode pelaporan akuntansi. Perusahaan sebaiknya memberikan informasi mengenai risiko, dan mengungkapkannya secara jelas dan akurat. Pengungkapan risiko dapat dikatakan baik apabila pengguna merasa diberikan informasi yang lengkap, jelas dan akurat (Wardhana dan Cahyonowati, 2013). Tiga konsep pengungkapan adalah pengungkapan yang cukup (*adequate*), wajar (*fair*), dan lengkap (*full*). Yang paling umum digunakan dari tiga konsep tersebut adalah pengungkapan yang cukup. Pengungkapan ini mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Wajar dan lengkap merupakan konsep yang lebih positif. Pengungkapan secara wajar menunjukkan tujuan etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan

umum bagi semua pemakai laporan keuangan. Pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relevan. Bagi beberapa pihak, pengungkapan yang layak ini diartikan sebagai penyajian informasi yang berlebihan, sehingga tidak bisa dikatakan akan layak (Indrayani dan Chariri, 2014).

Pengungkapan risiko merupakan faktor penting dalam pelaporan keuangan perusahaan karena dapat menginformasikan tentang bagaimana pengelolaan risiko dilakukan, serta efek dan dampaknya terhadap masa depan perusahaan (Utomo dan Chariri, 2014), manfaat lain pengungkapan resiko adalah meningkatkan akuntabilitas terhadap pengaruhnya dengan manajemen (stewardship), perlindungan investor dan mengurangi kemungkinan kegagalan keuangan, serta menurunkan biaya pendanaan eksternal perusahaan (Elzhar dan Hussainey, 2012).

Tata Kelola Perusahaan

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) pada tahun 2009 telah mengatur tentang penyelesaian masalah tata kelola perusahaan di Indonesia dalam penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Perspektif ini bermaksud menyelesaikan agency problem yang dihadapi oleh perusahaan dengan pemegang saham yang tersebar. Kebutuhan perusahaan atas tata kelola beragam dimana pada dasarnya diyakini bahwa perusahaan yang memiliki good corporate governance yang baik dapat bertahan terhadap guncangan pada kondisi makro ekonomi yang tidak stabil, isu penerapan Good Corporate Governance (GCG) masih hangat dan menarik perhatian para ekonom dan pelaku bisnis di Indonesia saat ini dalam upaya menciptakan nilai perusahaan yang berkelanjutan (OJK, 2014). Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) didasarkan atas lima prinsip: *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (responsibilitas), *independency* (independensi), serta *fairness* (kewajaran atau kesetaraan). Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalani dinamika bisnis sekarang ini, kelima pondasi tersebut menjadi penting untuk mendukung performa perusahaan. Dengan menerapkannya secara konsisten, kondisi perusahaan menjadi sehat, pasar yang baik tercipta dengan memiliki kepercayaan yang tinggi, dan mampu memberikan keuntungan bagi semua pemangku kepentingan (Supit, 2016).

a. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme dalam mengawasi serta memberikan petunjuk dan arahan kepada direksi. Direksi bertanggung jawab meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan (Kuswiratmo, 2016). Dalam susunan keanggotaan dewan komisaris terdiri dari komisaris utama, komisaris independen, dan komisaris. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2009).

Dewan komisaris independen akan bertindak sebagai pihak eksternal dari perusahaan dan biasanya hanya memiliki sedikit keterlibatan dalam pelaksanaan manajemen perusahaan (Wardhana dan Cahyonowati, 2013). Komisaris independen merupakan komisaris perusahaan yang dipilih dari pihak luar dan tidak terafiliasi dengan perusahaan (Agustina, 2014).

Perusahaan dirasa perlu untuk memberikan informasi mengenai proporsi dewan komisaris independen, karena perusahaan dengan tingkat proporsi dewan komisaris independen yang tinggi biasanya akan mendapat tuntutan untuk memberikan informasi lebih banyak demi menyeimbangkan tingkat risiko reputasi pribadi mereka. Sehingga diharapkan perusahaan dengan proporsi dewan komisaris independen yang tinggi akan melakukan pengungkapan risiko yang lebih tinggi (Oliveira *et al.* 2011).

b. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai penghubung antara dewan direksi dan auditor eksternal, internal auditor serta anggota independen, yang memiliki tugas untuk memberikan pengawasan auditor, memastikan manajemen melakukan tindakan korektif yang tepat terhadap hukum dan regulasi (Suryono dan Prastiwi, 2011). Lebih lanjut, komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan anggaran dasar perusahaan. Rapat dilaksanakan untuk melakukan koordinasi agar efektif dalam menjalankan pengawasan laporan dan pelaksanaan *corporate governance* perusahaan agar menjadi semakin baik (Suryono dan Prastiwi, 2011).

Di Indonesia, pedoman utama perusahaan dalam pembentukan komite audit didasarkan pada Peraturan Bapepam-LK No. IXI 5 yang mengatur tentang pembentukan dan pedoman serta pelaksanaan kerja komite audit. Salah satu syarat utama dalam keanggotaan komite audit adalah harus terdiri dari individu-individu yang independen dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan. Alasannya adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta objektif dalam menangani suatu permasalahan.

Struktur Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan salah satu cara untuk mengurangi biaya agensi. Kepemilikan yang berasal dari sumber eksternal cenderung memiliki monitoring yang lebih ketat untuk mendisiplinkan manajer sehingga terjadi keselarasan antara manajer dan pihak pemegang saham (Sarac dalam Lestari dan Juliarto, 2017). Kepemilikan institusional akan mempengaruhi manajemen perusahaan dalam mengelola urusan internal perusahaan, apabila institusi mempunyai presentase kepemilikan saham yang besar, maka akan lebih intensif dalam mempengaruhi manajemen internal perusahaan untuk mengamankan aset investasinya, dengan kata lain, kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif, sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manipulasi informasi mengenai risiko yang diungkapkan. Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan risiko perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang diungkapkan melalui reaksi pasar atas pengungkapan risiko dalam laporan keuangan perusahaan (Mubarok, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan sampel perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan melakukan *review* dan tabulasi data yang bersumber dari laporan keuangan.

Pada variabel Pengungkapan Risiko Keuangan (PRK), formula perhitungan yang digunakan adalah (Fauzi, 2016):

$$PRK = \frac{\text{Total item yang diungkap}}{\text{maksimal item pengungkapan}} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana maksimal item yang diungkapkan adalah 32 item pengungkapan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 1. Item Pengungkapan Risiko

No.	Jenis Risiko	Item Pengungkapan
1.	Risiko keuangan	a. Risiko pasar b. Kredit c. Likuiditas d. Tingkat bunga e. Nilai tukar
2.	risiko operasi	a. Kepuasan pelanggan b. Pengembangan produk c. Efisiensi dan pencapaian d. Proses manajemen e. Erosi merek dagang f. Pencarian sumber daya g. Kegagalan produk
3.	Risiko kekuasaan	a. Kepemimpinan dan manajemen b. Komunikasi c. Outsourcing d. Kinerja para karyawan e. Kesiap-siagaan
4.	Risiko teknologi	a. Akses b. Ketersediaan c. Infrastruktur teknologi d. Informasi yang dimiliki perusahaan
5.	Risiko integritas	a. Kebijakan manajemen risiko b. Kecurangan manajemen dan karyawan c. Tindakan ilegal d. reputasi
6.	Risiko strategi	a. pengamatan lingkungan b. industri c. potofolio bisnis d. pesaing e. peraturan f. penetapan harga g. penilaian politik dan kekuasaan

Sumber: Mokhtar dan Mellet (2013)

Pada variabel Dewan Komisaris Independen (DKI), formula perhitungan yang digunakan adalah (Agustina, 2014):

$$DKI = \frac{JKI}{JSDK} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

JKI : Jumlah Komisaris Independen

JSDK : Jumlah Seluruh Dewan Komisaris

Pada variabel Komite Audit, formula perhitungan yang digunakan adalah Jumlah total anggota Komite Audit (Suhardjanto, 2012).

$$\Sigma \text{Komite Audit} \dots\dots\dots(3)$$

Pada variabel Kepemilikan Institusional (KI), formula perhitungan yang digunakan adalah (Mubarok, 2013):

$$KI = \frac{SMPI}{\text{Total Saham}} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

Populasi pada penelitian ini berjumlah 16 perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Sedangkan pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria menghasilkan sampel sebanyak 6 perusahaan yang diperoleh dari perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya.

Tabel 2. Seleksi Sampel

No.	Kriteria Sampel	Total
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar dan sudah listing di BEI pada tahun 2012-2016 di sub sektor logam dan sejenisnya	16
2.	Perusahaan yang tidak mempublikasikan <i>annual report</i> pada tahun 2012-2016	(1)
3.	Perusahaan yang tidak memberikan data pengungkapan risiko	(5)
4.	Perusahaan yang melakukan pemecahan saham (<i>Stock split</i>)	(4)
	Total	6

Metode pengolahan data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan software SPSS 23. Metode regresi berganda yaitu metode statistik untuk menguji pengaruh antara beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Model yang digunakan dalam regresi berganda bertujuan untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen (X1), komite audit (X2) dan struktur kepemilikan institusional (X3) terhadap pengungkapan risiko (Y) dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots\dots\dots(5)$$

Dimana:

- Y = Pengungkapan Risiko Keuangan
- α = *Intercept* atau konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi
- X₁ = Dewan Komisaris Independen
- X₂ = Komite Audit
- X₃ = Kepemilikan Institusional
- ε = *Error term*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yang disajikan dari hasil penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data yang diperoleh dilapangan. Hasil pengolahan data statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen		
N	Valid Missing	30 0
Mean		,4040
Std. Error of Mean		,02189
Median		,4500
Mode		,50
Std. Deviation		,11990
Variance		,014
Skewness		-,001
Std. Error of Skewness		,427
Kurtosis		-1,112
Std. Error of Kurtosis		,833
Range		,42
Minimum		,25
Maximum		,67
Sum		12,12

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)

Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai variabel Dewan Komisaris Independen yang diperoleh mempunyai rata-rata 0,4040, median sebesar 0,45, Nilai minimum 0,25 dan Nilai maksimum 0,67.

Tabel 4. Komite Audit

Komite Audit		
N	Valid Missing	30 0
Mean		2,37
Std. Error of Mean		,148
Median		2,50
Mode		3
Std. Deviation		,809
Variance		,654
Skewness		-,373
Std. Error of Skewness		,427
Kurtosis		-,660
Std. Error of Kurtosis		,833
Range		3
Minimum		1
Maximum		4
Sum		71

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)

Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai variabel Komite Audit mempunyai rata-rata 2,37, median sebesar 2,50, nilai minimum 1 dan nilai maksimum 4.

Tabel 5. Struktur Kepemilikan Institusional

Struktur Kepemilikan Institusional		
N	Valid Missing	30 0
Mean		80,7643
Std. Error of Mean		2,53141
Median		81,8300
Mode		59,23 ^a
Std. Deviation		13,86510
Variance		192,241
Skewness		-,284
Std. Error of Skewness		,427
Kurtosis		-1,259
Std. Error of Kurtosis		,833
Range		38,76
Minimum		59,23
Maximum		97,99
Sum		2422,93

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)

Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai variabel Kepemilikan Institusional mempunyai rata-rata 80,7643, median sebesar 81,8300, nilai minimum 59,23 dan nilai maksimum 97,99.

Tabel 6. Pengungkapan Risiko Keuangan

Pengungkapan Risiko Keuangan		
	Valid	
	Missing	
N		30
		0
Mean		,3947
Std. Error of Mean		,02463
Median		,4100
Mode		,28
Std. Deviation		,13490
Variance		,018
Skewness		,204
Std. Error of Skewness		,427
Kurtosis		-,515
Std. Error of Kurtosis		,833
Range		,56
Minimum		,13
Maximum		,69
Sum		11,84

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)

Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai variabel Pengungkapan Risiko mempunyai rata-rata 0,3947, median sebesar 0,4100, nilai minimum 0,13 dan nilai maksimum 0,69.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 7. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		Dewan Komisaris Independen	Komite Audit	Struktur Kepemilikan Institusional	Pengungkapan Risiko Keuangan
N		30	30	30	30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,4040	2,37	80,7643	,3947
	Std. Deviation	,11990	,809	13,86510	,13490
Most Extreme Differences	Absolute	,288	,283	,170	,169
	Positive	,178	,183	,147	,169
	Negative	-,288	-,283	-,170	-,098
Kolmogorov-Smirnov Z		1,579	1,551	,933	,926
Asymp. Sig. (2-tailed)		,054	,056	,349	,358

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)

Pada tabel 7 terlihat bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* untuk semua sampel lebih besar dari 0,05, sehingga H_0 diterima, dengan kata lain bahwa data dari semua sampel pada penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 8. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a				
Model		Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,661		
	Dewan Komisaris Independen	,002	,321	3,115
	Komite Audit	,299	,321	3,117
	Struktur Kepemilikan Institusional	,484	,974	1,027

a. Dependent Variable: Pengungkapan Risiko Keuangan

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)

Dari tabel 8 terlihat semua variabel bebas, memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi adanya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas antar variabel bebas dalam model.

Tabel 9. Uji Autokorelasi

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,840 ^a	,706	,672	,07727	2,007

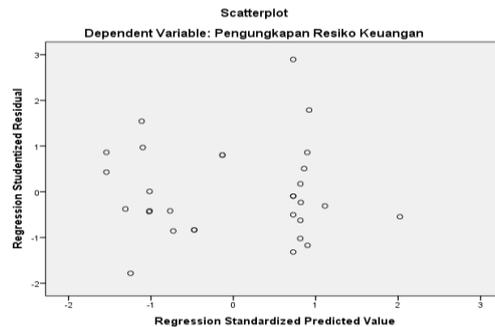
a. Predictors: (Constant), Struktur Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit

b. Dependent Variable: Pengungkapan Risiko Keuangan

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)

Dari hasil pengujian data, penelitian memiliki nilai DW = 2.007, yang berada sekitar 2, sehingga data terbebas dari masalah autokorelasi.

Gambar 1. Uji Heterokedastisitas



Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)

Berdasarkan Gambar 1. terlihat bahwa dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan ZRESID (nilai residualnya). Model yang didapatkan tidak terdapat pola tertentu pada grafik, sehingga model terbebas dari masalah heterokedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Pengujian regresi linier berganda bertujuan menguji ada tidaknya pengaruh variabel independen (Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Pengungkapan Risiko). Berikut hasil uji regresi berganda.

Tabel 10. Koefisien Regresi

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.041	.092		-.444	.661
1 Dewan Komisaris Independen	.734	.211	.653	3.477	.002
Komite Audit	.033	.031	.199	1.061	.299
Struktur Kepemilikan Institusional	.001	.001	.077	.710	.484

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)

Dari hasil olah data diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$\hat{Y} = -0,041 + 0,734 X_1 + 0,033 X_2 + +0,001 X_3 + e$$

Dimana :

- Y = Pengungkapan Risiko
- X1 = Dewan Komisaris Independen
- X2 = Komite Audit
- X3 = Kepemilikan Institusional

Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh, maka model regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Koefisien konstanta sebesar - 0,041 menunjukkan bahwa apabila nilai X₁, X₂ dan X₃ bernilai nol maka tingkat Pengungkapan Risiko sebesar - 0,041.
2. Koefisien b₁ sebesar 0,734 artinya apabila Dewan Komisaris Independen (X₁) mengalami kenaikan sebesar satu satuan, sementara variabel lain bersifat tetap, maka variabel Pengungkapan Risiko (Y) akan meningkat sebesar 0,734, dengan kata lain semakin banyak Dewan Komisaris Independen akan meningkatkan

Pengungkapan Risikonya. Nilai Sig sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko

3. Koefisien b_2 sebesar 0,033 artinya apabila Komite Audit (X_2) mengalami kenaikan sebesar satu satuan, sementara variabel lain bersifat tetap, maka variabel Pengungkapan Risiko (Y) akan meningkat sebesar 0,033, dengan kata lain semakin banyak Komite Audit akan meningkatkan Pengungkapan Risikonya. Nilai Sig sebesar 0,299 lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan Komite Audit berpengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko.
4. Koefisien b_3 sebesar 0,001 artinya apabila Kepemilikan Institusional (X_3) mengalami kenaikan sebesar satu satuan, sementara variabel lain bersifat tetap, maka variabel Pengungkapan Risiko (Y) akan meningkat sebesar 0,001, dengan kata lain semakin tinggi kepemilikan institusional akan meningkatkan Pengungkapan Risikonya. Nilai Sig sebesar 0,484 lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan Kepemilikan Institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko

Tabel 10. Uji Signifikansi

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,373	3	,124	20,795	,000 ^b
	Residual	,155	26	,006		
	Total	,528	29			

a. Dependent Variable: Pengungkapan Resiko Keuangan
 b. Predictors: (Constant), Struktur Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)

Dari pengolahan data terlihat bahwa nilai $F_{hitung} = 20,795$, sedangkan nilai $F_{tabel} = 3,35$, sehingga disimpulkan $F_{hitung} > F_{tabel} (20,795 > 3,35)$. Begitupula nilai $Sig F = 0.000$, lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya H_0 ditolak yang berarti bahwa koefisien regresi tersebut signifikan. Dengan kata lain bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional secara bersama-sama terhadap variabel terikat Pengungkapan Risiko.

Tabel 11. Koefisien Korelasi

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,840 ^b	,706	,672	,07727	2,007

a. Predictors: (Constant), Struktur Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit
 b. Dependent Variable: Pengungkapan Resiko Keuangan

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)

Koefisien korelasi (r) adalah 0,840, hal ini berarti ada hubungan yang positif antara Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional dengan Pengungkapan Risiko dan hubungannya adalah sangat kuat, sebab berada pada selang korelasi 0,800 - 1,000. Adapun besaran pengaruh persamaan model Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional terhadap variabel terikat Pengungkapan Risiko memiliki Koefisien determinasi sebesar 0,706 menunjukkan bahwa besarnya kontribusi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional secara bersama-sama terhadap Pengungkapan Risiko adalah sebesar 70,6 %, sisanya disebabkan oleh faktor lain.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Abraham dan Cox (2007) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen, komite audit dan dewan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko.

Dewan komisaris independen memiliki tugas untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh direktur perusahaan. Dewan komisaris independen akan bertindak sebagai pihak eksternal dari perusahaan dan biasanya hanya memiliki sedikit keterlibatan dalam pelaksanaan manajemen perusahaan, sedangkan komite audit adalah sekumpulan orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (*disclosure*). Dalam perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar, kompleks dan beragam akan menimbulkan kesulitan bagi dewan direksi untuk melaksanakan pengawasan dan pengelolaan risiko.

Adanya kepemilikan institusional akan mengurangi konflik keagenan karena dalam aktivitas perusahaan pihak manajemen akan diawasi atau dikontrol pihak institusi, sehingga meminimalkan kecurangan didalam manajemen, Kepemilikan institusional dimana umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Sedangkan Pengungkapan risiko adalah salah satu bentuk *disclosure* yang dilakukan perusahaan untuk memberikan informasi mengenai risiko-risiko yang dialami dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan dalam satu periode pelaporan akuntansi. Pengungkapan risiko dapat dikatakan baik apabila pengguna merasa diberikan informasi yang lengkap, jelas dan akurat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian secara parsial, Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Risiko, Komite Audit berpengaruh tidak signifikan terhadap Pengungkapan Risiko dan Kepemilikan Institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap Pengungkapan Risiko.

Berdasarkan penelitian secara bersama-sama terdapat pengaruh signifikan variabel bebas Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional secara bersama-sama terhadap variabel terikat Pengungkapan Risiko, dengan demikian secara bersama-sama ketiga faktor independen memberikan dampak yang sesuai dengan ketentuan teori yang ada, hal ini menunjukkan bebas Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional sudah berjalan dengan cukup efektif dalam melakukan pengawasan yang berkaitan dengan risiko bisnis pada emiten subsektor logam dan sejenisnya di Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang positif antara Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional dengan Pengungkapan Risiko dan hubungannya adalah kuat. kontribusi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan kepemilikan institusional secara bersama-sama terhadap Pengungkapan Risiko adalah sebesar 70,6 %, sisanya disebabkan oleh faktor lain.

Saran

1. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan Pengungkapan Risiko oleh karena itu investor sebaiknya memperhitungkan variabel Dewan Komisaris Independen dalam berinvestasi pada saham subsektor logam dan sejenisnya.
2. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial, Komite Audit berpengaruh tidak signifikan terhadap Pengungkapan Risiko, sehingga pemerintah perlu melakukan penguatan pada komite audit pada perusahaan di Indonesia dengan regulasi yang lebih baik.
3. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial, Kepemilikan Institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap Pengungkapan Risiko. ini menunjukkan kepemilikan institusional yang ada di Indonesia juga masih bersifat spekulatif dengan mengedepankan faktor teknikal dalam melakukan investasi pada portofolio kepemilikan saham, artinya institusi pemegang saham pada suatu emiten masih mengedepankan perhitungan keuangan (laba-rugi, earning per share, nilai perusahaan) sehingga diperlukan perubahan mental investor dalam berinvestasi, yakni investasi untuk jangka panjang.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memasukkan variabel lain yang belum termasuk dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustami, Silviana dan Anggun Cahyani Yunanda. 2014. *Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Sukarela terhadap Biaya Hutang*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol 2 No 2.
- Agustina, Cintia Heko. 2014. *Pengaruh Kompetisi, Corporate Governance, Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Risiko*. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 3, Nomor 4.
- Anisa, Gessy Windi. dan Lulus 2012. *“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Manajemen Risiko (Studi Empiris pada Laporan Tahunan Perusahaan Perusahan Nonkeuangan yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010)”*. Universitas Diponegoro.
- BAPEPAM. 2002. *Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : SE – 02/PM / 2002 Tanggal : 27 Desember 2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Manufaktur*. Jakarta. Badan Pengawas Pasar Modal.
- Christie. Devi Febina. 2012. *Analisis Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko Keuangan dalam Interim Report (Studi empiris pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. Semarang : Universitas Diponegoro,
- Elzhar, H., dan K. Hussainey. 2012. *“Determinants of Narrative Risk Disclosure in UK interim reports”*. *The Journal of Risk Finance*, Vol. 13, No.2, pp. 133-147.
- Fitri, Anita. 2015. *Pengaruh Corporate Sosial Responsibility, Leverage, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak*. Jurnal Akuntansi Vol 2, No.2 Oktober. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

- Indrayani, Vera dan Anis Chariri. 2014. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Likuiditas terhadap Kelengkapan Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2010-2012*. Diponegoro Journal Of Accounting. Volume 3, Nomor 4.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2009. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta.
- Kuswiratmo, Bonifasius Aji. 2016. *Keuntungan dan Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*, Penerbit Visimedia. Jakarta.
- Lestari, Nopi Puji dan Agung Juliarto, 2017. *Pengaruh Dimensi Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur*. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 6, Nomor 3.
- Mangena, M., Pike, dan R., Li, J. 2010. *Intellectual Capital Disclosure Practices and Effects on the Cost of Equity Capital: UK Evidence*. The Institute of Chartered Accountants of Scotland.
- Mokhtar, E.S., dan H. Mellett. 2013. "Competition, Corporate Governance, Ownership Structure and Risk Reporting". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 28, No. 9, pp. 838-865.
- Mubarok, Muhammad Andi. 2013. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Pengungkapan Risiko dalam Laporan Keuangan Interim". Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Oliveira, Jonas, Lucia Lima Rodrigues dan Russell Craig. 2011. "Risk-related disclosure by non-finance companies". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 26, No. 9, pp. 817-839.
- Peraturan BAPEPAM VIII G.7 Tahun 2012 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Keuangan Emiten.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.Nomor 32/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.No.1*.[Http://iaiglobal.Or.Id/V03/StandarAkuntansiKeuangan/Pernyataan-Sak-7-Psak-1-Penyajian-Laporan-Keuangan](http://iaiglobal.Or.Id/V03/StandarAkuntansiKeuangan/Pernyataan-Sak-7-Psak-1-Penyajian-Laporan-Keuangan).
- Suhardjanto, Djoko, Aryane Dewi, Erna Rahmawati, dan Firazonia M. 2012. "Peran Corporate Governance dalam Praktik Risk Disclosure pada perbankan". *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol. 9, No.1, pp. 1-96
- Supit, Claudia Lavenia 2016. *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada PT. Wang Konstruksi Indonesia*. Jurnal AGORA Vol.4, No. 2,
- Suryono, H., dan A. Prastiwi. 2011. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance (GC) terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report (SR)". "Jurnal SNA". Vol 14.

- Utomo, Yogi dan Anis Chariri, 2014. *Determinan Pengungkapan Risiko Pada Perusahaan Nonkeuangan di Indonesia*. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 03, Nomor 03.
- Wardhana, A.A., dan N. Cahyonowati. 2013. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Risiko". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 2, No. 3.